

SUDUT PANDANG *HUMAN RIGHTS WATCH* MENGENAI ISU KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUDAN SELATAN

Wihelmina Melissa¹, Camila Tatya Nadida², Riany Linggar Sari³, Ida Kurnia⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email Wihelmina.205190230@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : Camila.205190258@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email : Riany.205190217@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
*Email : idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

*“ Human Rights Watch's Perspective on the Issue of Crimes Against Humanity and Sexual Violence in South Sudan
“ Research is based on crimes against humanity and sexual violence in South Sudan, East Africa. This case starts from a civil war and it started became a serious violence like crimes against humanity on international levels, sexual violence, food crisis, torture, slaughter and even murder is something that South Sudanese people often face regardless of age. There are so many minors and innocent woman become victims of torture. Even civilians are limited in voicing their aspirations and expression. There are so many bad things that happened to the South Sudanese people. In this case, we the writers discuss this issue from the perspective of Human Rights Watch. Human Rights Watch is an international organization who act as part of the great spirit movement of the victims to keep fighting to protect dignity and promote human rights. The purpose of this research is explain aspects of Human Rights Watch's response to the issues of crimes against humanity and sexual violence in South Sudan. We use the secondary data and qualitative data for the descriptive method of writing in this journal which explains the subject matter of the existing secondary data. Therefore, Human Rights Watch can provide patronage to the Sudanese people in South Sudan.*

Key Words : *Human Rights Watch, Crimes Against Humanity, Sexual Violence.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Sudut Pandang *Human Rights Watch* Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan dan Kekerasan Seksual di Sudan Selatan” ini dilatarbelakangi dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan Selatan, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Kasus ini bermula dari perang antar saudara yang mengakibatkan adanya kejahatan kemanusiaan tingkat internasional. Kekerasan seksual, krisis pangan, penyiksaan, pembantaian bahkan sampai pembunuhan merupakan hal yang sering dihadapi oleh penduduk Sudan Selatan tanpa memandang umur. Banyak sekali anak dibawah umur dan wanita tak bersalah menjadi korban penyiksaan. Warga sipil pun terbatas dalam menyuarakan aspirasi dan berekspresi. Banyak sekali hal buruk yang menimpa warga Sudan Selatan. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam sudut pandang *Human Rights Watch*. *Human Rights Watch* merupakan organisasi internasional yang bertindak sebagai bagian dari gerakan semangat besar para korban untuk tetap berjuang demi melindungi martabat dan mempromosikan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran *Human Rights Watch* dalam merespon isu kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual di Sudan Selatan. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya *Human Rights Watch* dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di Sudan Selatan.

Kata kunci: *Human Rights Watch, Kejahatan manusia, Kekerasan Seksual.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang terletak di New York dan berperan untuk melakukan penelitian serta pembelaan dalam sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. *Human Rights Watch* telah mengeluarkan berita laporan

penelitian mengenai berbagai permasalahan norma dan hak asasi manusia seperti yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Umum atas Hak Asasi Manusia yang diakui dunia Internasional. Laporan ini ditujukan untuk menarik perhatian dunia Internasional atas pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung dan memberikan tekanan kepada banyak negara, juga kepada para organisasi Internasional untuk menghentikan atau menolong untuk menghentikan berbagai isu yang sedang terjadi. Di dalam *Human Rights Watch*, para ilmuwan melakukan penelitian guna mencari fakta yang akurat serta melakukan investigasi terhadap hal-hal yang mencurigakan dan memberikan berita laporan kepada media lokal maupun Internasional. Permasalahan yang diangkat oleh *Human Rights Watch* di dalam berita laporannya termasuk diskriminasi berdasarkan sosial dan gender, penyiksaan, eksploitasi anak oleh militer, korupsi politik, dan pelanggaran sistem peradilan. *Human Rights Watch* mendokumentasikan serta membuat laporan mengenai pelanggaran militer dan hukum humaniter internasional.

Human Rights Watch juga melihat kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual pada wilayah Sudan dan Sudan Selatan yang disebabkan oleh perang saudara. Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di bagian Timur benua Afrika. Meskipun Republik Sudantelah memperoleh kemerdekaan di tahun 1956 melalui bantuan dari Mesir dan Inggris, konflik perang saudara yang terjadi di area Sudan cukup membahayakan. Berdasarkan data dari SIPRI(2015), konflik ini terus meningkat sejak tahun 2000-an terutama di bagian Afrika dan Timur Tengah. Menurut Global Peace Index (GPI)¹ beberapa negara di kawasan Afrika masuk ke dalam golongan negara yang tidak aman dengan nilai diatas 3, seperti Sudan Selatan dengan angka 3,397. Ada dua etnis besar di Sudan Selatan yakni etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari pada etnis Arab. Namun, etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung berpihak kepada etnis Arab. Seperti pada pembagian wilayah, etnis Arab bermukim di daerah Utara yang lebih makmur. Pendapatan dari sumber daya alam berupa minyak yang lebih banyak berasal dari wilayah Selatan pun lebih banyak digunakan untuk pembangunan di wilayah Utara. Dikarenakan perlakuan tidak adil yang sering terjadi maka terpiculah perang saudara di Sudan Selatan. Tidak hanya sampai di permasalahan etnis apa yang lebih mendominasi dan sumber daya alam minyak, permasalahan yang dihadapi dalam perang saudara ini bukanlah sekedar konflik yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena permasalahan yang dihadapi di Sudan Selatan juga meliputi pelanggaran atas hak pangan yang mengakibatkan gizi buruk bertahun-tahun, pemerkosaan kepada wanita dalam skala besar, penganiayaan, bahkan pembunuhan secara tak manusiawi yang mengharuskan anak dibawah umur ikut menyaksikannya. Kejahatan seperti ini merupakan kejahatan tingkat internasional yang membutuhkan perhatian para pejuang hak asasi manusia untuk bisa menyelamatkan para korban di Sudan Selatan. Dalam hal ini *Human Rights Watch* sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pembelaan terhadap permasalahan hak asasi manusia masih melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kejahatan dan kekerasan yang terjadi di area Sudan Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang sudah dikemukakan diatas, tim penulis juga memiliki ketertarikan untuk membahas isu ini secara lebih lanjut mengenai berbagai kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang telah terjadi di wilayah Sudan Selatan serta peran *Human Rights Watch* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. *Human Rights Watch* juga memiliki kewajiban dan kewenangan tersendiri terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

¹ The Global Peace Index (GPI), adalah indeks yang dibuat oleh *Institute for Economics and Peace* menggunakan indikator untuk mengkategorikan 162 negara di dunia berdasarkan kondisi keamanan negara.

Tim penulis juga ingin menjabarkan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran *Human Rights Watch* dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan menghentikan krisis humaniter yang terjadi di Sudan Selatan. Dan manfaat dari penelitian ini, tim penulis ingin memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai situasi dan kondisi terhadap konflik yang terjadi di Sudan Selatan terutama kekerasan terhadap kemanusiaan. Kasus ini didominasi pada anak dibawah umur dan perempuan. Dalam hal ini penulis ingin memberi pengetahuan bagaimana peran organisasi internasional dalam mengimplementasikan wujud hukum internasional dalam menghentikan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis meliputi penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian ini dilakukan melalui cara mengidentifikasi fakta hukum dan juga mengeliminasi hal - hal ataupun sesuatu yang tidak relevan dalam langkah memutuskan atas isu hukum yang akan dipecahkan serta melakukan pengumpulan bahan - bahan hukum maupun non hukum, kemudian setelah itu dilakukan telaah atas isu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab isu hukum dalam penulisan ini.² Setelah itu metode pendekatan kasus (*Case Approach*) akan dipakai dalam langkah untuk penelitian pada kali ini, adapun yang dimaksud pendekatan kasus ialah pendekatan yang memfokuskan pada *ratio decidendi* namun akan dapat dilakukan penemuan hal tersebut dengan cara memperhatikan fakta materiil yang berupa tempat, waktu, oran serta segala hal yang menyertainya. Sifat penelitian dari penelitian ini adalah preskriptif, yang dilakukan dengan cara memahami serta mempelajari terhadap nilai- nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan juga tujuan hukum di dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.³ Data yang akan dilakukan pengumpulan dengan studi kepustakaan, dilakukan melalui pengumpulan atas putusan - putusan pengadilan yang sudah berstatus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta informasi media yang terkait. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah Sudan, khususnya negara bagian Afrika Timur.

Pengambilan saran dan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam penulisan penelitian. Pengambilan kesimpulan yang diambil bersumber atas data-data yang sudah diperoleh dan juga dianalisa, berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian kesimpulan diambil dari berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan pengambilan saran atau rekomendasi dalam penelitian ini berasal dari permasalahan dalam pembahasan yang membutuhkan solusi dalam langkah menghadirkan perubahan lebih baik di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Sudan Selatan terletak pada bagian Timur di benua Afrika, dan menyandang status sebagai “negara terbaru” di wilayah tersebut. Walaupun negara Sudan Selatan telah merdeka setelah melepaskan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011 serta melewati banyak persoalan dan pergolakan. Namun kemerdekaan yang hakiki belum dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan, terlebih bagi kaum perempuan.⁴ Konflik ini berawal dari diberhentikannya seluruh kabinet pemerintahan antara dua etnis terbesar di wilayah yang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 213

³ *Ibid.*, hal. 158

⁴ Max Fisher, “9 Questions About South Sudan You Were Too Embarrassed To Ask”

bersangkutan; yaitu Dinka dan Nuer.⁵ Konflik kelompok bersenjata tersebut menyebabkan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil setempat dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Para kelompok bersenjata juga melakukan perusakan properti penduduk, melakukan penjarahan menjarah serta perekrutan anak-anak sebagai pasukan dalam kelompok mereka.⁶

Pada tahun 2014, Pemerintah Sudan Selatan telah menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Komitmen untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik yang mana mengancam keras penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Langkah ini pun mendatangkan berbagai pujian dari masyarakat internasional. Namun, beberapa bulan setelah deklarasi tersebut dikeluarkan, Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, turut melaporkan kembali terkait adanya tindak kekejaman terhadap perempuan di wilayah tersebut, bahkan mereka menyebutkan bahwa kekerasan di Sudan Selatan adalah yang paling mengerikan yang pernah disaksikan.⁷ Penyiksaan ini juga menyerang anak dibawah umur. Banyak sekali kekerasan tidak manusiawi seperti dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan terhadap sukunya sendiri, dipaksa untuk melihat penyiksaan keji seperti pencungkilan mata, penggorokan, pemenggalan kepala, dan yang paling parah dibakar serta dimutilasi secara hidup-hidup. Penyiksaan ini juga mengakibatkan krisis besar-besaran di seluruh negeri tentang hak atas pangan. Lebih dari setengah delapan juta negara menderita kelaparan ekstrem dan gizi buruk akibat kejahatan ini. Mayoritas penduduk Sudan bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka.

Menurut ⁸Sacco. "Batas yang ditetapkan oleh *World Health Organization*, gizi pada anak-anak di Sudan berada di atas ambang darurat. Sekitar 700.000 anak menderita malnutrisi akut. Malnutrisi ini juga disebabkan oleh kondisi air dan sanitasi yang tidak memadai, biaya makanan yang tinggi, kemiskinan, pola makan yang buruk, dan minimnya kebiasaan variasi makanan dan nutrisi penting. Menurut Komisi Eropa, tingkat malnutrisi Sudan pada November 2018 adalah yang tertinggi di Afrika. Satu dari enam anak menderita gizi buruk dan satu dari 20 anak menderita gizi buruk akut. Ini mengancam jiwa dan membutuhkan

perawatan segera. Selain menyebabkan penderitaan terhadap bahan pangan, kejahatan ini juga merampas hak atas pendidikan dan hal yang lebih mengesankan adalah sekitar lebih dari empat juta orang diusir paksa dari rumah mereka dan harus tinggal di kamp-kamp pengungsian yang tidak terjamin keamanannya. Akibat dari banyaknya krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Sudan Selatan, banyak negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut memberikan perhatian khusus, maka dari itu selaku organisasi Hak Asasi Manusia dunia, *Human Rights Watch* ikut mengambil alih dalam mencari solusi pada masalah yang terjadi di Sudan Selatan, menurut *Human Rights Watch* peristiwa Sudan Selatan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan dan krisis pangan yang tinggi. Akibat dari konflik Sudan Selatan sangat besar dan disorot oleh dunia terpenting tingginya tingkat kekerasan seksual, terlebih terhadap warga sipil. Berbagai lembaga hak asasi manusia melaporkan bagaimana kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini menggunakan kekerasan seksual sebagai "taktik teror" dan "senjata perang".⁹ Anak-anak dan perempuan juga mengalami tindakan pemerkosaan secara beramai-

⁵ Kristin Myers, "Timeline: South Sudan's History at a Glance" <https://www.concernusa.org/story/timeline-southsudan-history>, Diakses pada 19 November 2021.

⁶ Anonim, "Civil War In South Sudan", <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>, Diakses pada 19 November 2021

⁷ Lydia Stone, "A Continuum Of Suffering: Violence Against Women And Girls In The South Sudan Conflict", <https://odihpn.org/magazine/continuum-suffering-violence-women-girls-south-sudan-conflict/>, Diakses pada 19 November 2021

⁸ Act News, "Orang Tua di Sudan Berusaha Cegah Gizi Buruk" <https://news.act.id/berita/orang-tua-di-sudan-berusaha-cegah-gizi-buruk> Diakses pada 07 November 2021

⁹ Alicia Elaine Luedke, "That thing of human rights': discourse, emergency assistance, and secual violence in South Sudan's

ramai dan penculikan. Hal tersebut dibuktikan oleh informasi dari PBB pada tahun 2016, telah terjadi peningkatan aksi kekerasan berbasis gender atau biasa disebut dengan *Gender-Based Violence* (GBV) di Sudan Selatan yang mencapai 60% dan 70% di antaranya adalah perempuan yang diperkosa sejak awal meletusnya konflik pada tahun 2013.¹⁰ PBB melaporkan bahwa dalam satu bulan, 120 kekerasan seksual telah terjadi terhadap rakyat.¹¹ Kekerasan seksual yang telah terjadi pada perempuan di Sudan Selatan semakin tidak manusiawi. Perempuan sebagai korban mengatakan satu-satunya cara agar perempuan tetap aman (tidak mengalami kekerasan seksual) adalah mati. Hal tersebut menandakan bahwa semakin buruknya situasi bagi perempuan di Sudan Selatan. Oleh karena itu, *Human Rights Watch* memiliki peran penting dalam menangani kekerasan yang terjadi. Tujuan *Human Rights Watch* sendiri ialah membela hak-hak orang di seluruh dunia.

Human Rights Watch melakukan tugasnya dengan menyelidiki pelanggaran, menyatakan fakta yang lebih luas, dan memberi penekanan kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghormati hak dan keadilan (*Human Rights Watch* 1978). Hal ini berdampak bahwa, *Human Rights Watch* menemukan masalah hak asasi manusia yang bermakna termasuk pembunuhan warga sipil oleh pasukan keamanan, milisi klan, dan penyerangan yang tidak diketahui, tetapi kelompok Al Shabaab melakukan sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia besar lainnya termasuk penghilangan, penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan bermotivasi politik, termasuk dari wartawan, penggunaan tentara anak-anak, pembatasan kebebasan berbicara dan pers, pengusiran paksa, relokasi dan pelecehan seksual pengungsi secara internal (IDPs), gangguan, pengalihan, dan perampasan kemanusiaan (*United State Department of State* 2017). “Besarnya konflik di wilayah Sudan Selatan telah menyebabkan pesatnya kejahatan terhadap warga sipil. Kejahatan ini dilakukan dengan penyiksaan keji terhadap warga sipil baik pria, wanita maupun anak-anak. Para penjahat ini menyiksa mereka dengan melakukan pemerkosaan bergantian kepada para perempuan. Mereka juga melakukan penculikan, pemukulan dan yang paling parah dibakar secara hidup-hidup.” ucap Donatella Rovera seorang Senior *Crisis Response Adviser* kepada Amnesty International. Beberapa saksi mata juga bersaksi kepada Amnesty International bagaimana pemerintah, sekutu dan pihak lainnya dengan sengaja membunuh warga sipil. Para korban yang lolos dari tragedi tersebut mengutarakan hal yang serupa dimana terjadi serangan pada malam hari di tanggal 16 Mei 2017, para tentara pemerintah secara brutal menahan beberapa orang di desa Kudupi, daerah Kajo Keji. Para milisi memaksa para warga sipil untuk masuk ke sebuah gubuk lalu membakarnya secara hidup-hidup. Atas insiden tersebut terdapat Enam orang tewas, diantaranya dua ditemukan dibakar hingga tak bernyawa dan empat lainnya tertembak saat mereka mencoba melarikan diri. terang empat orang yang selamat kepada Amnesty International.¹²

Lalu pada tanggal 18 Mei 2017 terjadi kelima kalinya penyerangan terhadap warga sipil. Dalam empat serangan pertama, mereka menjarah barang, menyiksa, menangkap para warga, dan mencuri. Lalu Mereka akan membawa warga ke tempat tersembunyi untuk menyiksa mereka. Mereka juga akan menangkap para perempuan dibawah umur untuk diperkosa dan kemudian

current civil war. Wiley Online Library: 2017”, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/disa.12273> diakses pada 5 November 2021

¹⁰ Voa Indonesia, “Penganiayaan Seksual di Sudan Selatan terjadi dalam “Skala MasiP”, <https://www.voaindonesia.com/a/penganiayaan-seksual-di-sudan-selatan-terjadi-dalam-skala-masif/3956343.html> diakses pada 6 November 2021

¹¹ Melisa Riska Putri, “PBB: Ada 120 Kasus Kekerasan Seksual di Sudan Selatan, Republika Internasional: 2016”, <https://republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/28/ob02pt377-pbb-ada-120-kasus-kekerasan-seksual-disudan-selatan> diakses pada 6 November 2021

¹² Sudan Selatan: Kekejaman yang terus berlanjut mengubah sumber penghidupan Negara menjadi lahan pembantaian diakses dari <https://www.amnesty.id/sudan-selatan-kekejaman-yang-terus-berlanjut-mengubah-sumberpenghidupan-negara-menjadi-lahan-pembantaian/> pada 12 November 2021

dibebaskan kembali. Atas semua kejadian yang telah terjadi Tidak ada satupun yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Sedangkan menurut Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa Menimbang bahwa adalah hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan secara paksa, hak para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan dan, Menegaskan hak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai. Seperti tertuang sebagai berikut ;

Pasal 1

1. Tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa.
2. Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasanpembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Pasal 2

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.¹³

Human Rights Watch memiliki nilai-nilai yang dijunjung bersama sebagai acuan dalam merealisasikan misinya (*Human Rights Watch*, 2017), yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia merupakan suatu bentuk komitmen terhadap misi *human rights watch* berdasarkan peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia dan humaniter internasional serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
2. Independent *Human Rights Watch* merupakan organisasi yang tidak menerima dana dari pemerintah dalam menjalankan perannya baik secara langsung atau tidak langsung. Human Rights Watch juga tidak menerima dana dari pribadi manapun yang dapat membahayakan objektivitas dan independensi Human Rights Watch. Human Rights Watch tidak bersifat politis dan partisan karena untuk menjaga netralitas dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, Human Rights Watch sangat menjaga nilai independensi nya.
3. Aktif berfokus pada Dampak Human Rights Watch menjelaskan bahwa perannya dinyatakan berhasil bila tindakan yang telah dilakukan mengarah pada perubahan positif dan berkelanjutan. Human Rights Watch berkomitmen untuk mengerjakan situasi sulit, di mana perhatian jangka panjang diperlukan untuk dampak yang berarti.

Misi dan nilai-nilai Human Rights Watch yang dituangkan di atas, merupakan landasan bagi Human Rights Watch untuk menjalankan perannya. Human Rights Watch salah satu langkah nya dalam mengatasi kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi adalah dengan mengirimkan surat panggilan kepada Jenderal Besar Umar AL- Bashir untuk diadili di dalam pengadilan Internasional Criminal Court (ICC), jadi dapat dikatakan peran Human Rights Watch disini merupakan upaya untuk mendesak Jenderal Besar sudan selatan tersebut untuk diadili di ruang lingkup ICC dikarenakan hanya ICC yang memiliki yurisdiksi atau berwenang dalam mengadilinya yang mencakup dunia internasional, namun pemerintah sudan selatan menolak untuk mengadilinya karena Umar Al- Bashir merupakan pemimpin besar sehingga pemerintahan nya pun ikut mendukung kegiatan kejahatan manusia yang sudah dilakukan nya, hal tersebut pula

¹³ Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/9/konvensi-internasional-tentangperlindungan>

yang menyebabkan permasalahan kejahatan manusia dan kekerasan seksual yang terjadi di wilayah sudan selatan tidak kunjung terselesaikan, di sisi lain masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut terus menerus diambil hak nya akan tetapi pemerintahan sudan selatan pun ikut mendukung perbuatan kejahatan tersebut.¹⁴

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang terletak di New York dan berperan untuk melakukan penelitian dan pembelaan dalam isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Topik yang dibahas di dalam artikel ini berfokus pada kejahatan kemanusiaan kelas berat yang terjadi di Sudan Selatan, Afrika Utara. Terdapat banyak sekali kejahatan kemanusiaan yang tak kunjung selesai di negara Sudan. Beberapa permasalahan yang tidak luput di area Sudan adalah kejahatan dan penyiksaan mengerikan bagi kaum perempuan, krisis pangan pada anak, kehilangan kebebasan berpendapat dan berserikat serta pembunuhan tak manusiawi. Meskipun Sudan Selatan telah merdeka setelah melepaskan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011 silam dan melalui berbagai dinamika serta berbagai pergolakan, kemerdekaan yang hakiki tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan, terutama perempuan, anak, dan warga sipil. Konflik ini berawal dari diberhentikannya seluruh kabinet pemerintahan. Konflik terjadi di antara dua kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut; Dinka dan Nuer. Akibat pecahnya konflik tersebut, kelompok bersenjata yang terlibat menargetkan serangan mereka kepada warga sipil dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghancuran properti milik warga, penjarahan, serta perekrutan anak-anak sebagai pasukan dalam kelompok mereka. Anak-anak yang direkrut dalam pasukan ini mengalami penyiksaan. Anak dibawah umur dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan terhadap sukunya sendiri, dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan tak manusiawi seperti pencungkilan mata, penggorokan, pemenggalan kepala dan yang paling parah dibakar serta dimutilasi secara hidup-hidup. Penyiksaan pada anak ini juga merenggut hak atas pangan, hak atas pendidikan, dan hak atas pendidikan. Pelanggaran hak atas pangan ini mengakibatkan lebih dari setengah delapan juta negara menderita kelaparan ekstrem dan gizi buruk. Warga sipil juga mengalami kejahatan kelas internasional secara brutal. Banyak warga yang dipotong-potong sampai mati dengan parang dan dibakar hidup-hidup. Sejumlah saksi mata di Sudan juga mengatakan bagaimana pasukan pemerintah dan sekutu milisi dengansengaja membunuh warga sipil tanpa pikir panjang. Dalam kasus Sudan Selatan ini *Human Rights Watch* segera mengambil tindakan, salah satu langkahnya dalam mengatasi kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan adalah dengan mengirimkan surat panggilan kepada presiden Omar AL- Bashir untuk diadili di dalam peradilan *Internasional Criminal Court* (ICC), jadi dapat dikatakan peran *Human Rights Watch* disini merupakan upaya untuk mendesak presiden sudan selatan tersebut untuk diadili di ruang lingkup ICC dikarenakan hanya ICC yang memiliki yurisdiksi atau berwenang dalam mengadilinya yang mencangkup dunia internasional.

Saran

Menurut tim penulis langkah yang diambil oleh Human Rights Watch dalam menangani konflik ini sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya membantu para korban di Sudan Selatan. Sebagai generasi bangsa yang tergolong masih muda kita harus turut serta peduli terhadap isu-isu internasional dan mencari cara untuk menolong para korban di Sudan seperti mengumpulkan

¹⁴ Syahri Mahmud, "Darfur-Sudan Korban Kepentingan Barat",
<https://herminsyahri.wordpress.com/2009/03/07/darfur-sudan-korban-kepentingan-barat/>, diakses
pada 7 November 2021

bahan-bahan pangan, pakaian, obat-obatan, serta air bersih untuk disumbangkan ke area yang mengalami krisis pangan dan air bersih tersebut. Kita juga harus mengirimkan bantuan medis seperti dokter umum dan dokter spesialis kejiwaan untuk mereka yang melangami trauma akibat kekerasan yang terjadi. Kami sangat berharap agar Sudan segera mendapat bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dan kiranya perang yang mengakibatkan jutaan korban ini segera berakhir.

Ucapan terima kasih

Kami para tim pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya tulisan ini dapat terselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. karena atas bimbingan dan sarannya para tim mendapatkan ilmu mengenai hukum transnasional dan hal yang menyokong keberhasilan artikel ini. Dan terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman tim yang sudah membantu kami dalam mencari referensi dan memberikan kritik serta saran yang membangun dalam keberhasilan penulisan artikel ini.

REFERENSI

1. *The Global Peace Index (GPI)*, adalah indeks yang dibuat oleh *Institute for Economics and Peace* menggunakan indikator untuk mengkategorikan 162 negara di dunia berdasarkan kondisi keamanan negara.
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 213
3. *Ibid.*, hal. 158
4. Max Fisher, "9 Questions About South Sudan You Were Too Embarrassed To Ask" https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/30/9-questions-about-south-sudan-you-were-too-embarrassed-to-ask/?utm_term=.52cc1945af08, Diakses pada 18 November 2021.
5. Kristin Myers, "Timeline: South Sudan's History at a Glance", <https://www.concernusa.org/story/timeline-southsudan-history>, Diakses pada 19 November 2021.
6. Anonim, "Civil War In South Sudan", <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>, Diakses pada 19 November 2021.
7. Lydia Stone, "A Continuum Of Suffering: Violence Against Women And Girls In The South Sudan Conflict", <https://odihpn.org/magazine/continuum-suffering-violence-women-girls-south-sudan-conflict/>, Diakses pada 19 November 2021.
8. Act News, "Orang Tua di Sudan Berusaha Cegah Gizi Buruk" <https://news.act.id/berita/orang-tua-di-sudanberusaha-cegah-gizi-buruk> Diakses pada 07 November 2021
9. Alicia Elaine Luedke, "That thing of human rights': discourse, emergency assistance, and sexual violence in South Sudan's current civil war. Wiley Online Library: 2017", <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/disa.12273> diakses pada 5 November 2021
10. 10 Voa Indonesia, "Penganiayaan Seksual di Sudan Selatan terjadi dalam "Skala Masif"., <https://www.voaindonesia.com/a/penganiayaan-seksual-di-sudan-selatan-terjadi-dalam-skala-masif/3956343.html> diakses pada 6 November 2021
11. Melisa Riska Putri, "PBB: Ada 120 Kasus Kekerasan Seksual di Sudan Selatan, Republika Internasional: 2016", <https://republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/28/ob02pt377-pbb-ada-120-kasus-kekerasan-seksual-di-sudan-selatan> diakses pada 6 November 2021

12. Sudan Selatan: Kekejaman yang terus berlanjut mengubah sumber penghidupan Negara menjadi lahan pembantaian diakses dari <https://www.amnesty.id/sudan-selatan-kekejaman-yang-terus-berlanjut-mengubah-sumberpenghidupan-negara-menjadi-lahan-pembantaian/> pada 12 November 2021
13. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2016/09/30/9/konvensi-internasional-tentangperlindungan-terhadap-semua-orang-dari-tindakan-penghilangan-secara-paksa.html> pada 12 November 2021
14. Syahri Mahmud, “Darfur-Sudan Korban Kepentingan Barat”, <https://herminsyahri.wordpress.com/2009/03/07/darfur-sudan-korban-kepentingan-barat/>, diakses pada 7 November 2021

(halaman kosong)